JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 5 Nomor2, APRIL 2024. HALAMAN 112 - 123
e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur

Rauzahlia[a]*, Nasrul Kahfi Lubis[b], Iqlima Azhar[c]
[abc]*Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra*
[a]*email: rauzahlia88@gmail.com

ABSTRACT

This reseach aims to see how influential regional levies, regional texes and economic growth of local original income in east aceh district tahman 2013-2022. This research uses data collection techniques through the results of data prosessing, documentation, namely secondary data in the form of reports on the realization of the east aceh district budget. Based on the results of data processing using the spss application, it shows that (1) regional retribution in the period 2013-2022 has a significant impact on original income regional with sig 0,042 <0,05. (2) regional taxes in the 2013-2022 period have an insignificant effect on local original incoe with sig 0,608 > 0,05. (3) economic growth has an insignificant effect on local original income with sig 0,077 > 0,05.

***Keywords**: Basic Levies; Local Taxes; Economic Growth;regional original revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini bertutujuan untuk melihat seberapa pengaruhnya retribusi daerah, pajak daerah dan pertumbuhan ekonommi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Timur tahun 2013-2022. Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data melalui hasil pengolahan data, dokumentasi, yaitu data sekunder berupa laporan realisasi anggaran kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan hasil pengolahan data mengunakan aplikasi spss, menunjukan bahwa (1) restribusi daearah dalam periode 2013-2022 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daearah dengan sig 0,042 <0,05.(2) pajak daerah dalam periode 2013-2022 berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan sig 0,608 >0,05 (3) pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan sig 0,077 >0,05.

***Kata kunci:** Retribusi Daearah, Pajak Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 2 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah sendiri yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah sah dan dana perimbangan. Yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengali pendanaan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Demi terselenggaranya otonomi daerah secara optimal, maka telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini dijadikan sebagai wujud dukungan pendanaan atas dilakukannya asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah. sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan retribusi daerah, pajak daerah dan Pendapatan Lain-lain. Mardiasmo (2016) pajak dan retribusi daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota guna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Walupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah belum efektif atau tidak terealisasinya dari target anggaran.

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2020 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Rasio %
2013	47.801.957.952	42.805.235.987	90,92
2014	79.260.371.581	86.544.530.935	109,19
2015	94.072.964.671	98.704.908.471	104,92
2016	107.020.180.360	94.337.443.632	88,15
2017	164.288.180.444	158.492.371.449	96,47
2018	176.549.143.142	169.455.864.158	95,07
2019	202.093.734.432	185.148.022.753	91,61
2020	210.849.932.018	198.202.802.576	94,00

Sumber : Badan Pengelola Statistik (data diolah) 2023

Sesuai data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Aceh Timur berdasarkan tabel diatas dari tahun 2013-2020 mengalami fluktasi (tidak tetap) dimana presentase pertumbuhannya yaitu pada tahun 2013 sebesar 90,92 % di tahun 2014 dan 2015 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 109,19% Dan 104,92% tahun 2016 mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 88,15% kemudian di tahun 2017 mengalami lagi kenaikan sebesar 96,47% pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 95,07% dan 91,61% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 94.00%. Hal ini disebabkan karena melemahnya belanja rumah tangga dan pemerintah. Selain itu, masih kurang optimalnya pemerintah kabupaten aceh timur dalam melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Aceh Timur sehingga mengakibatkan pembangunan di aceh timur berkurang dan terjaid kemunduran ekonomi kesejahtraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa setiap tahun pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur mengalami ketidakstabilan yang signifikan dari tahun ke tahun yang disebabkan salah satunya oleh pemungutan pajak yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur terus mengupayakan dan menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Pemerintah daerah bukan berarti harus menambah pungutan pajak baru untuk memenuhi pendapatan daerah, melainkan pemerintah daerah harus pandai dalam menggali potensi daerah yang dimiliki secara optimal yang dapat dijadikan sebagai penerimaan daerah. Keselarasan antara pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap terjaga dalam menetapkan kebijakan yang tepat dan dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada.

Adapun indikator pertumbuhan ekonomi itu penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan daerah. PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya

PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Hernawati, 2019; Sukmaraga, 2015).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keungan yang diperoleh dari sumber potensi daerah itu sendiri dan dipunggut berdasarkan peraturan perundaang-undangan. Menurut Mardiasmo (2016), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah (Henu Caesar, 2020).

indikator pendapatan asli daerah (PAD) menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 2) bahwa Sumber Pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah:
   a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
   b. Retribusi Daerah (RD)
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
   d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari:
   a. Sumbangan dari pemerintah
   b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
   c. Pendapatan lain-lain yang sah

Retribusi Daerah

Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang-undang no 1 tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah dalam pasal pasal 2 di jelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiani (2022), Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasihtas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dari beberapa defiisi retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan wajib dari penduduk yang dikarenakan adanya jasa tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2015) ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan,
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Asih, 2018).

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 2 ayat 21 yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. jenis pajak sebagai berikut:

1. Pajak provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KM), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, Pajak rokok.
2. Jenis pajak di kabupaten/kota yaitu: 1) pajak hotel; 2) pajak restoran; 3) pajak hiburan;4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak parker; 7) pajak air mineral bukan logam dan batuan; 8) pajak air tanah; 9) pajak saran burung wallet; 10) bea perolehan ha katas tanah dan bangunan; 11) PBB perkotaan dan pendesaan.

Pertumbuhan Ekonomi

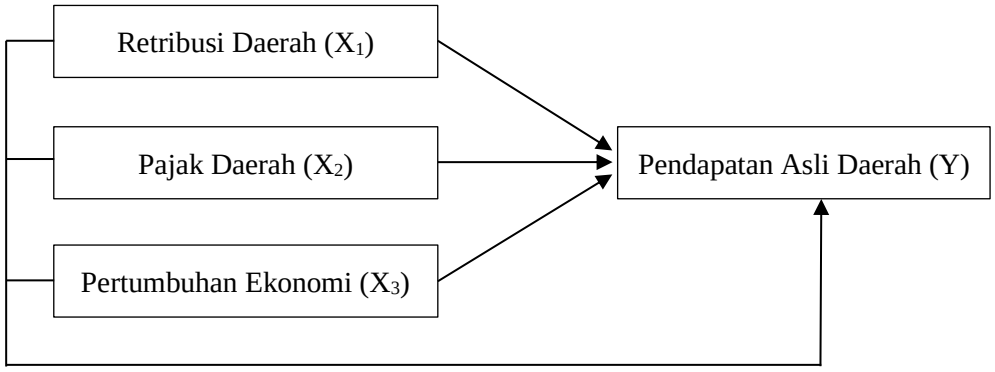
Pertumbuhan ekonomi itu penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Nilai PDRB akan memberi suatu gambaran bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di daerah. *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan daerah. PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan

produktivitasnya. PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah atau daerah (Hernawati, 2019; Sukmaraga, 2015).

Hernawati (2019) menyebutkan bahwa PDRB dibagi menjadi dua indikator yaitu:

1. PDRB atas harga konstan, yaitu menunjukkan nilai tambah barang serta jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga harga tahun dasar.
2. PDRB atas harga berlaku, yaitu menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan.

Gambaran bagaimana retribusi daerah, pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat skema gambar 1. Adapun skema dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Komseptual

Berdasarkan penjelasan pada teori –teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka dapat diperkirakan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh penerimaan retribusi daerah, pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi. Adapun rincian hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_1: retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadapa pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Timur.

H_2: pajak daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Timur.

H_3: pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Timur.

H_4: restribusi daerah, pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi pengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, suatu hal yang menjadi kepentingan peneliti untuk investigasi (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur. Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti (Sekaran & Bougie, 2016), sampel yang dipilih mengunakan metode *purposive sampling.* Metode *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil memiliki kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini mengunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang di ukur berdasarkan angka atau skala numerik (Kuncoro, 2016). Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LRA diperoleh dari badan pengelolaan keuangan daerah kaupaten Aceh Timur tahun 2013-2022. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui dua tahapan, yaitu: metode dokumentasi yang merupakan kumpulan data berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan system pengelolaan data dengan cara menelusuri dan mengunduh data yang dibutihkan. Dan studi pustaka, yakni jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara tiga atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, sebelumnya dilakukan analisis pengaruh dalam penerimaan retibusi daerah, pajak daerah dan. Pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan data sekunder yang berupa Data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Timur. Data sekunder yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan *program Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 20. Untuk melakukan analisis data sekunder perlu dilakukan Uji Asumsi Klasik.

Adapun rumusnya menurut Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

$\hat{Y}$ = Pendapatan Asli Daerah

A = Konstanta, merupakan bilangan yang tidak terpengaruh besar kecilnyavariabel independen.

b_1-b_3 = Koefisien regresi, besar kecilnya variabel Y akibat perubahan satu unit variabel X.

X_1 = Retribusi Daerah

X_2 = Pajak Daerah

X_3 = Pertumbuhan ekonomi

e = Standar Eror

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitiaan

Uji Klasik

Uji normalitas

Uji Normalitas dilakukan pada tahap awal ketika melakukan analisis data. Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Hal ini dapat dilihat melalui pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test.* Dalam pengujian Kolmogrov-Smirnov Test, dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitasnya (nilai Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan probabilitasnya (nilai Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nilai pengujian

dalam penelitian *Kolmogorov-Smirnov Test* penelitian ini yaitu *sig* adalah 0,042 berda dibawah nilai signifikansi 0,05 (0,042 < 0,05), maka data residual berdirtibusi normal.

Uji muttikolinieritas

Uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengetahui model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas menyebabkan regresi tidak efisien atau penyimpangan yang besar. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas didalam model regresi yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2014)). Hasil pengujian multikolinieritas diperoleh retribusi daerah 2.887, pajak daerah 2,896, dan pertumbuhan ekonomi 1.067 > 0,1 yaitu sebesar 2.896. nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10, nilai independen yaitu kurang dari 10 (sepuluh). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ada mutltikolonieritas atau tidak ada hubungannya yang kuat antara variabel bebas (independen).

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan variasi residual pada model regresi. Model regresi yang dikatakan tidak baik adalah terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2014). Untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan mengunakan metode grafik *plot* untuk menilai antara prediksi variabel berikut (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), jika pada grafik scatter plot yang terlihat titik yang membentuk pola tertentu, yang beraturan (misalnya gelombang, yang melebar dan kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa terjadi Heteroskedastisitas Begitu juga sebaliknya. Pada penelitian ini titik menyebar tidak membentuk suatu pola/alur tertentu dan titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefiensi determinasi

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinan Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725[a]	.526	.289	.07292

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah
Sumber: Data olah SPSS 2024

Koefisien *R square* digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). Bisa di lihat dalam tabel diatas Nilai *R square* yang dihasilkan 0,526 yang berarti 52,6% dari variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Restribusi Daerah, Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan sisanya yaitu 47,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat di jelaskan oleh model regresi

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda (Coefficients[a])

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.846	1.070		6.398	.001
	Retribusi Daerah	-.630	.245	-1.233	-2.576	.042
	Pajak Daerah	.076	.140	.157	.542	.608
	Pertumbuhan Ekonomi	.104	.049	1.019	2.134	.077

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah
Sumber: Data olah SPSS 2024

Uji t

$$Y = 6.846 – 0,1,233X1 + 0,157X2 + 0,1,019X3$$

Berdasarkan tabel menunjukan nilai koefiensi regresi adalah sebagai berikut:

1. Variabel retribusi daerah (X_1) adalah -0,1.233 bernilai negatif. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat nilai retribusi daerah maka akan meningkat pula nilai PAD (Y) begitu pula sebaliknya. variabel retribusi daerah memiliki nilai t < -2.576 dengan nilai sig 0,042 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel retribusi daerah kabupaten Aceh Timur berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian H_1 diterima.
2. Variabel selanjutnya pajak daerah (X_2) adalah 0,157 bernilai positif. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat nilai pajak daerah maka semakin meningkat pula nilai PAD (Y). variabel pajak daerah memiliki nilai t > (0,524 nilai sig 0,608) dengan nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel pajak daerah kebupaten Aceh Timur berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian H_2 di tolak.
3. Variavel selanjutnya pertumbuhan ekonomi (X_3) adalah 0,1.019 benilai positif. hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat nilai pertumbuhan ekonomi semakin pula meningkat pula PAD (Y). variabel pertumbuhan memiliki nilai t > (0,2.134 nilai sig 0,077) dengan signifikansi 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Timur berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian H_3 di tolak.

Tabel 4. Hasil Uji F (ANOVA[a])

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.035	3	.012	2.218	.187[b]
	Residual	.032	6	.005		
	Total	.067	9			

a. Dependent Variable: pendapatan asli daerah

b. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah

Uji F

Berdaskan tabel di atas diperoleh hasil uji F. nilai F sebesar 2.218 dan nilai sig 0,187. Dengan nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen yaitu restribusi daerah, pajak daerah, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Aceh Timur. Dengan demikian H_4 ditolak.

Pembahasan

Retribusi daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki t hitung sebesar -2.576 dengan sig.t sebesar 0,042. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel restribusi daerah positif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, karena variabel restribusi daerah memiliki nilai signifikan < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis pertama diterima. Berdasarkan tabel retribusi daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang mencolok terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 61,68%, tetapi masih dalam tingkat sangat efektif. Dengan demikian target tahun selanjutnya semakin membaik.

Tabel 5. Data Restribusi Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2022

No	Tahun	Target Penerimaan Restribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Restribusi Daerah	Rasio Realisasi %
1	2013	12.406.264.172	8.368.291.093	67.45
2	2014	41.108.030.357	21.145.579.415	51.44
3	2015	38.449.213.387	30.101.828.434	78.29
4	2016	17.393.826.400	12.800.818.167	73.60
5	2017	19.847.489.000	17.846.424.206	90.00
6	2018	21.609.671.257	18.782.162.114	86.92
7	2019	23.683.000.000	19.035.734.819	80.38
8	2020	1.451.000.000	897.532.836	61.86
9	2021	1.153.000.000	768.658.840	66.67
10	2022	1.573.000.000	1.040.769.660	66.17

Sumber data : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (2023)

Pajak daerah

Berdasarkan hasil uji **t** menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah t hitung sebesar 542 dengan sig.t sebesar 0,608. Hasil ini menunjukkan bhawa variabel pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena variabel pajak daerah memiliki signifikan > 0,05. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang diajukan ditolak. Penurunan terjadi pada tahun 2020 yakni target realisasi anggaran pajak sebesar Rp14.041.700.000 sedangkan yang realisasi hanya sebesar Rp11.814.154.294 yang disebabkan oleh kondisi luar biasa COVID-19 yang berdampak pada kemampuan terhadap pembayaran pajak daerah berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan secara rata-rata tingkat ekfektivitas pajak daerah pada kabupaten aceh timur terhitung tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kriteria sangat efektif. pajak daerah yang negatif menunjukkan bahwa pajak daerah secara persial meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten aceh timur. Walaupun begitu Pemerintah kabupaten aceh timur harus memperhatikan permasalahan keuangan, pengeluaran atau pemasukan transaksi pajak daerahnya sendiri secara rinci dan mendalam lagi, hal ini diperlukan agar tujuan yang dibangun untuk meningkatkan kesejahtraan tercapai. Dengan demikian pajak di Aceh Timur diharapkan semakin membaik di tahun-tahun kedepannya.

Tabel 6. Data Pajak Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 2022

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Realisasi %
1	2013	3.722.000.000	4.371.450.662	117.45
2	2014	4.916.000.000	7.129.879.239	145.03
3	2015	6.402.000.000	8.031.473.347	125.45
4	2016	6.619.500.000	8.307.578.729	125.5
5	2017	8.519.000.000	10.457.216.638	122.75
6	2018	12.914.000.000	15.761.344.038	122.05
7	2019	14.363.000.000	14.751.233.835	102.7
8	2020	14.041.700.000	11.814.154.294	84.14
9	2021	16.486.862.915	14.295.455.459	86.71
10	2022	18.097.500.000	17.357.692.096	95.91

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (2023)

Pertumbuhan ekonomi

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki T hitung sebesar 2.134 dengan sig.t 0,077. Hasil ini menunjukkan bhawa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan > dari 0,05. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang diajukan ditolak. Adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan ini berarti bahwa kondisi Aceh Timur, dapat kita lihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten aceh timur tidak stabil setiap tahun nya atau lambat meningkatnya karena masih kurangnya produksi barang dan jasa ke masyarakat di kabupaten aceh timur. Akibat pertumbuhan ekonomi yang

tidak stabil dan relatif lambat yang terjadi di kabupaten aceh timur, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh timur. Perubahan ini terjadi lebih disebabkan karena faktor-faktor produksi di aceh timur yang masih mangekpor hasil dan membeli barang dari luar.

Tabel 7. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2022

No	Tahun	PDRB ADHK (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	2013	7.761.221	1.08
2	2014	7.721.422	-0.51
3	2015	7.259.933	-5.98
4	2016	7.175.794	-1.02
5	2017	7.487.534	4.34
6	2018	7.802.174	4.2
7	2019	8.146.982	4.42
8	2020	8.272.641	1.54
9	2021	8.433.526	1.94
10	2022	8.748.419	3.73

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (2023)

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa, secara parsial restribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapaatan asli daerah di kabupaten Aceh Timur. Sedangkan variabel, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah, pajak daerah, pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diberikan. Bagi pemerintah kabupaten Aceh Timur, disarankan pada saat proses penyusunan anggaran agar mengelompokan antara program utama dan program pendukung. Sehingga pendanaan yang dianggarkan dapat tepat guna dan tertata. Mengutamakan program-program yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menyiapkan program pendukung yang nantinya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menaikan angkat pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Timur. Mengoptimalkan upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi sumber kekayaan yang dimiliki daerah agar dapat memenuhi pengeluarannya sehingga akan mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Mengawasi dengan benar pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran belanja baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam penelitiannya. Hal ini dikarenakan variabel dalam penelitian ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kondisi pendapatan asli daerah secara lebih mendalam di kabupaten Aceh Timur. Disarankan juga agar menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi/ pajak daerah sebagai variabel

pemoderasi, tujuannya ialah untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi/pajak daearah dapat memperkuat atau memperlemah pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Timur.

REFERENSI

Asih, S. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Restribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variable Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. **Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik,** 9(1), 177–191.

Azzumar, M. R., & Handayani, H. R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). **Skripsi**, Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Univ. Diponegoro Press.

Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. ***Jurnal EMT KITA,*** 2(1), 28–37.

Henu Caesar, P. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal. **Skripsi**, Universitas Pancasakti Tegal.

Hernawati. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. **Skripsi**, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kuncoro, M. (2016). **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi.** Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Mardiani, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020. **Skripsi**, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.

Mardiasmo. (2016). **Perpajakan Indonesia.** Jakarta: Salemba Empat.

Priyatno, D. (2014). **SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis.** Yogyakarta: Andi Press.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). M**etode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian.** Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2015). **Pajak dan Retribusi Daerah.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.** Bandung: CV Alfabeta.

Sukmaraga. (2015). **Manusia, PDRB Per Kapita, Dan Jumlah.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.